

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan sumber daya manusia pada unit kerja rekam medis di Puskesmas Pulo Brayan Medan Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Unit rekam medis di Puskesmas Pulo Brayan tidak memiliki struktur organisasi mandiri dan berada di bawah koordinasi Tata Usaha. Akibatnya, tidak ada kepala unit khusus, sehingga kegiatan berjalan berdasarkan SOP puskesmas, bukan struktur internal unit. Perencanaan SDM dilakukan rutin setiap tahun oleh Kepala Tata Usaha bersama Kepala Puskesmas melalui analisis jabatan berbasis jumlah kapitasi, namun belum didukung SOP khusus perencanaan SDM.
2. Seluruh petugas yang saat ini bertugas di unit rekam medis UPT Puskesmas Pulo Brayan Medan telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, yaitu lulusan D-III Rekam Medis. Bahkan, terdapat petugas yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang D-IV sambil tetap menjalankan tugasnya.
3. Perencanaan SDM yang efektif memerlukan penyebaran informasi dan pelibatan seluruh staf, sementara di Puskesmas Pulo Brayan pegawai juga menjalankan tugas tambahan di luar fungsi pokoknya.
4. Puskesmas Pulo Brayan saat ini lebih mengutamakan optimalisasi tenaga internal yang tersedia, dan belum merencanakan penambahan personel dari luar kecuali dalam bentuk praktik mahasiswa yang bersifat sementara dan terbatas.

5. Rekrutmen petugas rekam medis di Puskesmas Pulo Brayan hanya melalui usulan kebutuhan via Analisis Jabatan, sementara keputusan akhir ditetapkan Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah melalui jalur CPNS/PPPK.
6. Petugas rekam medis tidak pernah mengikuti pelatihan, sementara ketidakterlibatan Kepala Rekam Medis dalam perencanaan SDM berisiko menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan lapangan dengan kebijakan, sehingga keterlibatannya sangat diperlukan.
7. Unit rekam medis tidak mengelola dana langsung, seluruh kebutuhan diajukan melalui Kepala Puskesmas/KTU dan dikelola bendahara. Pendanaan SDM sepenuhnya ditanggung Dinas Kesehatan, sementara dana JKN hanya sebagian dialokasikan untuk kebutuhan operasional unit.
8. Dari sisi kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja, tenaga kerja di unit rekam medis dinilai sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas-tugas rutin pelayanan kesehatan.

5.2 Saran

1. Puskesmas disarankan membentuk struktur organisasi mandiri unit rekam medis serta menyusun SOP perencanaan SDM sesuai pedoman Kementerian Kesehatan dan kondisi lapangan.
2. Puskesmas disarankan mendukung peningkatan pendidikan petugas rekam medis untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
3. Puskesmas disarankan melibatkan staf dalam perencanaan SDM dan meninjau tugas tambahan agar tidak menghambat fungsi pokok.

4. Puskesmas disarankan mengevaluasi beban kerja secara berkala dan menambah personel bila diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan.
5. Puskesmas disarankan melibatkan unit rekam medis dalam proses Analisis Jabatan agar usulan kebutuhan SDM lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebijakan Dinas Kesehatan.
6. Puskesmas disarankan mengadakan pelatihan bagi petugas rekam medis dan melibatkan Kepala Rekam Medis agar kebijakan dalam perencanaan SDM sesuai kebutuhan lapangan.
7. Puskesmas perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana dan mengoptimalkan dana JKN untuk pengembangan SDM.
8. Puskesmas disarankan meningkatkan kompetensi tenaga rekam medis melalui pelatihan dan evaluasi berkala agar tetap sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.